

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024
DINAS KETAHANAN PANGAN



DINAS KETAHANAN PANGAN

Jalan Jend. Sudirman Km 12 Kel. Sindur Kec. Cambai
Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Prabumulih Lt. 6

Provinsi Sumatera Selatan Kode 31114

Website : www.disketapangprabumulih.com

E-mail : ketahananpangan71@gmail.com

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Prabumulih, 14 Januari 2025
Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan



Subarti, SP, M.Si
NIP. 197403012003122003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	3
1.2.2 Anggaran.....	12
1.3 Dasar Hukum	12
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	13
BAB II.....	15
PERENCANAAN KINERJA	15
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	15
2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024	21
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	22
BAB III.....	29
AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1 Capaian Kinerja	29
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	30
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan 30	
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.....	47
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.....	52
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	51

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	60
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	62
3.2 Realisasi Anggaran	69
BAB IV	74
PENUTUP	74
LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024	12
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	15
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024....	17
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun 2024	21
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Perangkat Daerah.....	22
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024	24
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	30
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024.....	30
Tabel 3.2.1	Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Prabumulih Tahun 2024	32
Tabel 3.2.2	Rekapitulasi Persediaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih di Gudang PERUM BULOG KANWIL SUMSEL DAN BABEL Tahun 2013 – 2024.....	36
Tabel 3.2.3	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kota Prabumulih Berdasarkan Data Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2024	37
Tabel 3.2.4	Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas.....	39
Tabel 3.2.5	Sebaran Jumlah Desa Prioritas 4 - 6 berdasarkan Kecamatan...40	
Tabel 3.2.6	Hasil Uji Tes Residu Pestisida Sayuran.....	42
Tabel 3.2.7	Hasil Uji Tes Residu Pestisida Buah	43
Tabel 3.2.8	Penilaian SAKIP Tahun 2024 (untuk tahun 2023).....	46
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	47
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	52

Tabel 3.5	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	53
Tabel 3.6	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran.....	60
Tabel 3.7	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan.....	63
Tabel 3.8	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi.....	11
Gambar 3.1 Jumlah Desa /Kel berdasarkan Prioritas Kota Prabumulih 2024	40
Gambar 3.2 Sebaran Jumlah Desa/Kelurahan Priroitas 4 - 6 Per Kecamatan.....	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka DINAS KETAHANAN PANGAN diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan LKJIP DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran DINAS KETAHANAN PANGAN :

Melalui Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih dibentuk Dinas Ketahanan Pangan kota Prabumulih. Pengelolaan Ketahanan Pangan Kota Prabumulih pada awalnya dilakukan oleh Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan Kehutanan dan Ketahanan Pangan (BPPPPKKP) yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015.

Sejalan dengan pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih, Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih mempunyai tugas di Bidang Ketahanan Pangan berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan

Pertanian daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Mengacu kepada payung hukum diatas maka dikeluarkan Peraturan Walikota Kota Prabumulih Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Urusan Pemerintahan Wajib tidak berkaitan Dengan Pelayanan Dasar, Dinas Daerah kota Prabumulih, maka kewenangan pengelolaan Ketahanan Pangan diserahkan kepada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih.

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Prabumulih Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Prabumulih, DINAS KETAHANAN PANGAN mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pangan.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut DINAS KETAHANAN PANGAN mempunyai fungsi:

1. KEPALA DINAS

- (1) Dinas Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas.
- (2) Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas: membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas Dekonsentrasi dan Pembantuan di Bidang Ketahanan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan,

- cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - c. Pelaksanaan koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di Bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan;
 - f. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Oleh Walikota

2. SEKRETARIAT

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan.

- (3) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi:
- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran di bidang ketahanan pangan;
 - b. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
 - c. Pelaksanaan pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - f. Pengelolaan barang milik/ kekayaan negara; dan
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN

- (1) Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketersediaan dan kerawanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan

- koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung dan ketahanan pangan lainnya;
- b. Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - d. Pemberiaan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - e. Penyiapan pemantapan program di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN

- (1) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan penyiapan koordinasi di bidang distribusi pangan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - b. Pelaksanaan penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - c. Pelaksanaan penyiapan kebijakan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - d. Pelaksanaan pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - e. Pelaksanaan penyiapan pemantapan program di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

5. BIDANG KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

- (1) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.
- (2) Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan tentang konsumsi dan keamanan pangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. Pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di Bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - c. Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - d. Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - e. Penyiapan pemantapan program dan kegiatan di bidang konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
 - f. Pelaksanaan pemanatauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Konsumsi pangan, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan; dan
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

6. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dan fungsi sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

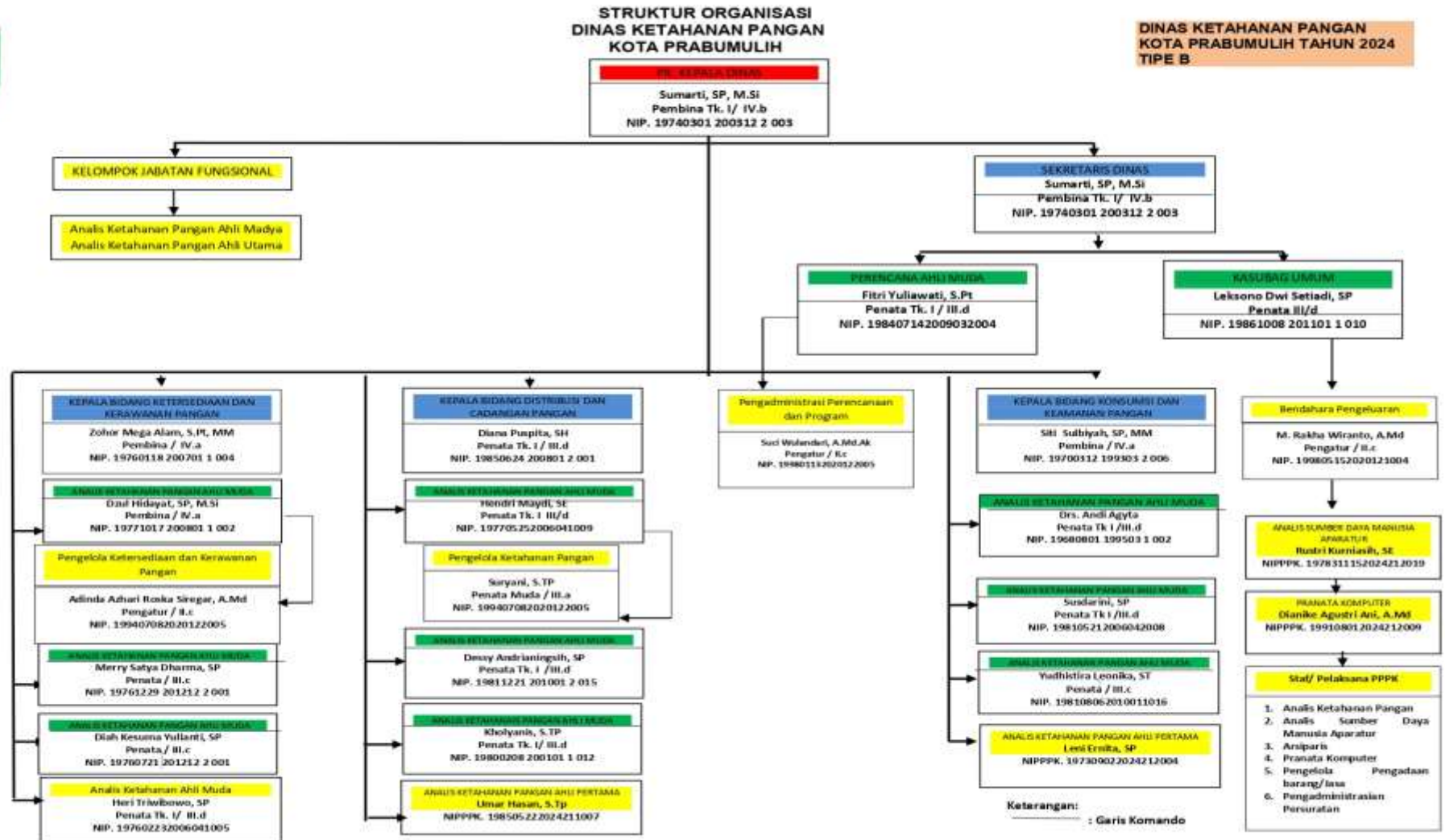
Susunan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum
 2. Perencana Ahli Muda Sub Koordinator Perencanaan dan Evaluasi
- c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahi :
 1. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Sub Koordinator Ketersediaan Pangan
 2. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Sub Koordinator Sumberdaya Pangan
 3. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Sub Koordinator Kerawanan Pangan
- d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahi :
 1. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Sub Koordinator Distribusi Pangan
 2. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Sub Koordinator Harga Pangan
 3. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Sub Koordinator Cadangan Pangan
- e. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan
 1. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Sub Koordinator Konsumsi Pangan
 2. Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda Sub Koordinator Penganekaragaman Konsumsi Pangan

3. Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda Sub Koordinator Keamanan Pangan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja DINAS KETAHANAN PANGAN. Berikut bagan struktur organisasi DINAS KETAHANAN PANGAN:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi DINAS KETAHANAN PANGAN



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan

1.2.2 Anggaran

Pada Tahun 2024 Anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih bersumber dari dana APBD. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh DINAS KETAHANAN PANGAN :

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD	2023	Rp 4.750.320.099
APBD	2024	Rp 4.663.211.700

Sumber : DPA Perubahan Tahun 2023 dan 2024 Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih

1.3 Dasar Hukum

Laporan Kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja.
2. Matriks Renstra (5 tahun)
3. LHE SAKIP Tahun 2024
4. TL LHE SAKIP Tahun 2024
5. Prestasi Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan dari DINAS KETAHANAN PANGAN berdasarkan RPD Kota Prabumulih adalah meningkatnya nilai tambah produksi industri dan meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran DINAS KETAHANAN PANGAN:

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun			
				2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	
1.1	Terciptanya Pertumbuhan dan Perkembangan Ekonomi yang Merata	1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	4,71	4,95	5,25
1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	1.1.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	94,1	94,3	94,6
1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	1.1.1.2	Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun	7.8 Ton	7.8 Ton	7.8 Ton
1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	1.1.1.3	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	91,2	93,7	96,8
1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	1.1.1.4	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	2,7%	0%	0%
1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	1.1.1.5	Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman	Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100%	100%	100%
1.4	Terlaksananya Reformasi Birokrasi Yang Efektif dan Efisien	1.4.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	70	75	80

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun		
					2024	2025	2026
1.4.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	70	74	78
1.4.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%	100%	100%

Sumber : Renstra DINAS KETAHANAN PANGAN Periode 2024 – 2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama DINAS KETAHANAN PANGAN adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	1,1,1#.1	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	Prosentase	Meningkatkan Produk Unggulan Daerah yang berbasis pemberdayaan masyarakat		
1.1.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	1.1.1.1#0.1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Angka	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan adalah angka kualitas ketersediaan pangan penduduk di suatu wilayah berupa komposisi sembilan kelompok pangan utama yang apabila dikonsumsi dapat memenuhi kecukupan gizi dan zat gizi lainnya. Skor PPH Ketersediaan yang tinggi menunjukkan bahwa konsumsi pangan penduduk lebih beragam dan seimbang	Skor PPH = %AKE x bobot dibandingkan dengan Skor Maksimum	Dinas Ketahanan Pangan
1.1.1.2	Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah	1.1.1.2#0.1	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun	Ton	Cadangan Pangan Pemerintah Kota Prabumulih adalah persediaan pangan pokok yang dikelola oleh pemerintah bertujuan untuk: 1. Meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat miskin dan atau rawan pangan yang terkena rawan pangan transien untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah 2. Memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga miskin dan atau rawan pangan yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana 3. Meningkatkan akses pangan rumah tangga miskin dan atau rawan	CBPK = [(A+P)/2] x 75% CBD	PERUM BULOG KANWIL SUMSEL BABEL, dan Dinas Ketahanan Pangan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					pangan akibat gejolak harga		
1.1.1.3	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	1.1.1.3#0.1	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi adalah indikator yang menunjukkan kualitas konsumsi pangan suatu daerah yang dihitung berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS). Skor PPH Konsumsi memiliki nilai maksimal 100. Semakin tinggi skor PPH Konsumsi, maka semakin beragam dan seimbang konsumsi pangan penduduk.	Skor PPH Konsumsi = % Angka Kecukupan Gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan yang sudah ditetapkan	Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), dan Dinas Ketahanan Pangan
1.1.1.4	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	1.1.1.4#0.1	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	Prosentase	Menurunnya daerah rentan rawan pangan adalah indikasi positif yang menunjukkan ketahanan pangan di suatu negara semakin membaik. Kerawanan pangan adalah kondisi ketika wilayah atau individu tidak memiliki cukup pangan yang aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau.	Persentase daerah rentan rawan pangan = Jumlah Desa/Kel Pada Prioritas 1 s/d 3 dibagi jumlah desa/kel di Kota Prabumulih	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, DiSDUKCAPIL, DISPERINDAG, dan BAPPEDA
1.1.1.5	Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman	1.1.1.5#0.1	Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	Prosentase	Keragaman konsumsi pangan yang sehat dan aman adalah upaya untuk mengonsumsi berbagai jenis makanan yang bergizi seimbang dan aman. Pangan yang sehat dan aman disebut juga dengan pangan B2SA (Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman). Kegiatan ini untuk memastikan keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang beredar di masyarakat. Pengawasan PSAT dilakukan untuk mencegah PSAT	1. Pengawasan di Peredaran Data yang dibutuhkan: a. Target Pengawasan di Peredaran yaitu: Persentase PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan ditetapkan sebesar 85% (T) b. Jumlah pengawasan dalam bentuk jumlah contoh/sampel yang diambil (N) c. Hasil Pengawasan dalam bentuk jumlah sampel/contoh yang memenuhi persyaratan Keamanan Pangan (P) Capaian Pengawasan di Peredaran (Post market):	Dinas Ketahanan Pangan

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
					terkontaminasi oleh bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Bahan-bahan tersebut bisa berupa pestisida, mikotoksin, dan logam berat.	<p>Realisasi PSAT yang memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu pangan di peredaran (Y) = $P/N \times 100\%$ Capaian (K) = $Y/T \times 100\%$ Capaian Tertimbang (K1) = $K \times 60\%$</p> <p>2. Registrasi dan Sertifikasi (pre market) Capaian Registrasi dan Sertifikasi (penjumlahan antara ijin edar dan sertifikat yang diterbitkan, termasuk SPPB PSAT, rumah kemas, health certificate (HC). a. Capaian Provinsi Jumlah Sertifikasi dan Registrasi/tahun Capaian (X) $>250 = 100\%$ $151 - \leq 250 = 80\%$ $101 - \leq 150 = 60\%$ $51 - \leq 100 = 40\%$ $< 50 = 20\%$ Capaian tertimbang (K2) = $40\% \times X$</p>	
1.4.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1.4.1#.1	Nilai SAKIP Kota	nilai	SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan	AA = > 90 - 100 A = > 80 - 90 BB = > 70 - 80 B = > 60 - 70 CC = > 50 - 60 C = > 30 - 50 D = 0 - 30	

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	1.4.1.1#0.1	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	nilai	SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, serta monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan	AA = > 90 - 100 A = > 80 - 90 BB = > 70 - 80 B = > 60 - 70 CC = > 50 - 60 C = > 30 - 50 D = 0 - 30	Inspektorat Kota Prabumulih
1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	1.4.1.1#0.2	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	prosentase	Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) adalah tindakan yang dilakukan oleh auditi untuk melaksanakan rekomendasi hasil pengawasan. TLHP bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dengan cara mengidentifikasi dan mendokumentasikan kemajuan auditee dalam melaksanakan rekomendasi audit.	Jumlah tindak lanjut hasil pengawasan dibagi jumlah laporan hasil pengawasan dikali 100%	Inspektorat Kota Prabumulih

Sumber: Indikator Kinerja Utama DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2024

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 termuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.

Berikut Rencana Kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2024 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 DINAS KETAHANAN PANGAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri		Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	Prosentase	4,71	
1.1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	1.1.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	Angka	94,1
1.1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	1.1.1.2	Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun	Ton	7,8
1.1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	1.1.1.3	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	91,2
1.1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	1.1.1.4	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	Prosentase	2,7
1.1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	1.1.1.5	Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman	Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	prosentase	100
1.4.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan			Nilai SAKIP Kota	Nilai	70

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	pemerintahan					
1.4.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	Nilai	70
1.4.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	Persentase	100

Sumber : Rencana Kerja DINAS KETAHANAN PANGAN tahun 2024

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala DINAS KETAHANAN PANGAN tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	4.71 %
1.1.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang cukup	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	94,1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Ketersediaan	
1.1.1.2	Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun	7,8 ton
1.1.1.3	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	91,2
1.1.1.4	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	2,7 %
1.1.1.5	Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan Sehat dan Aman	Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100%
1.4.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	70
1.4.1.1	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	70
1.4.1.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%

Sumber : Perjanjian Kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan.

Berikut rincian program, kegiatan, dan sub kegiatan DINAS KETAHANAN PANGAN:

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1.1.1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan Pangan	94,1
1.1.1.1.1.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100
1.1.1.1.1.1.1	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1
1.1.1.1.1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1
1.1.1.1.1.1.3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100
1.1.1.1.1.1.4	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan harga pangan tingkat produsen	2
1.1.1.1.1.1.6	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1
1.1.1.1.1.1.7	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	1
1.1.1.1.1.1.8	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1
1.1.1.1.1.1.9	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1
1.1.1.1.1.1.10	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1
1.1.1.2.1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun	7,8
1.1.1.2.1.1	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Kota	100
1.1.1.2.1.1.1	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	Rencana Kebutuhan Pangan Lokal	1
1.1.1.2.1.1.2	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota	9

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.1.2.1.1.4	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	5
1.1.1.3.1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	91,2
1.1.1.3.1.1	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Tercapainya Target Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	100
1.1.1.3.1.1.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1
1.1.1.3.1.1.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	4
1.1.1.4.1	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	2,7
1.1.1.4.1.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Tersedianya Peta Daerah Rawan Pangan	100
1.1.1.4.1.1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	1
1.1.1.4.1.2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tertanganinya Daerah Rentan Rawan Pangan	100
1.1.1.4.1.2.1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan	1
1.1.1.5.1	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100
1.1.1.5.1.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	100
1.1.1.5.1.1.1	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1
1.1.1.5.1.1.3	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pengujian Keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1
1.1.1.5.1.1.4	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1
1.4.1.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	70

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	KABUPATEN/KOTA		
1.4.1.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah disampaikan tepat waktu	100
1.4.1.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1
1.4.1.1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1
1.4.1.1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1
1.4.1.1.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1
1.4.1.1.1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1
1.4.1.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan disampaikan Tepat Waktu	100
1.4.1.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25
1.4.1.1.1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1
1.4.1.1.1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1
1.4.1.1.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1
1.4.1.1.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen BMD yang Disampaikan Tepat Waktu	100
1.4.1.1.1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1
1.4.1.1.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.1.1.1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	30
1.4.1.1.1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2
1.4.1.1.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi umum Perkantoran	100
1.4.1.1.1.5.1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1
1.4.1.1.1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1
1.4.1.1.1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1
1.4.1.1.1.5.5	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1
1.4.1.1.1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2
1.4.1.1.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi dengan efektif dan efisien	100
1.4.1.1.1.6.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1
1.4.1.1.1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1
1.4.1.1.1.6.3	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8
1.4.1.1.1.6.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6
1.4.1.1.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dengan efektif dan efisien	100
1.4.1.1.1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1
1.4.1.1.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100
1.4.1.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.1.1.1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2024

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. DINAS KETAHANAN PANGAN selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN tahun 2024 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	4,71	4,39	93,2	Sangat Rendah	Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan
1.1.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	94,1	94,59	100,59	Sangat Tinggi	Dinas Ketahanan Pangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.1.2	Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun	7,8	9	115,3	Sangat tinggi	PERUM BULOG KANWIL SUMSEL BABEL, dan Dinas Ketahanan Pangan
1.1.1.3	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	91,2	89,2	97,81	Sangat tinggi	Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS), dan Dinas Ketahanan Pangan
1.1.1.4	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	2,7	2,7	100	Sangat tinggi	Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, DiSDUKCAPIL, DISPERINDAG. dan BAPPEDA
1.1.1.5	Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman	Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100	78,56	78,56	Sangat tinggi	Dinas Ketahanan Pangan
1.4.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	70	60,86	86,94	Sangat Tinggi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Prabumulih
1.4.1.1	Meningkatnya	Nilai SAKIP	70	73,99	105,7	Sangat	Inspektorat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Ketahanan Pangan				tinggi	Kota Prabumulih
1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100	100	100	Sangat tinggi	Inspektorat Kota Prabumulih

Sumber : Laporan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1.1.1 Sasaran

⇒ Meningkatkan Ketersediaan Pangan yang Cukup

Indikator Kinerja

⇒ Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Capaian indikator kinerja "Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan" tahun 2024 adalah sebesar 94,59 dari target sebesar 94,1 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100,52 %. Capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Kondisi Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan di Prabumulih berdasarkan penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 3.2.1 dibawah ini :

Tabel 3.2.1 Pola Pangan Harapan (PPH) Tingkat Ketersediaan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Prabumulih Tahun 2024

No	Kelompok Bahan Pangan	Energi	% AKE	Bobot	Skor Riil	Skor PPH	Skor Maks
a	B	C	d	e	f	G	h
1.	Padi-padian	1.154	48,1	0,5	24,04	24,04	25,00
2.	Umbi-umbian	98	4,1	0,5	2,05	2,05	2,50
3.	Pangan Hewani	334	13,9	2,0	27,81	24,00	24,00
4.	Minyak dan Lemak	556	23,2	0,5	11,58	5,00	5,00
5.	Buah/Biji Berminyak	10	0,4	0,5	0,21	0,21	1,00

No	Kelompok Bahan Pangan	Energi	% AKE	Bobot	Skor Riil	Skor PPH	Skor Maks
a	B	C	d	e	f	G	h
6.	Kacang-kacangan	107	4,5	2,0	8,95	8,95	10,00
7.	Gula	188	7,8	0,5	3,91	2,50	2,50
8.	Sayuran dan Buah	134	5,6	5,0	27,84	27,84	30,00
9.	Lain-lain	-	-	-	0	-	-
	Jumlah	2.588	107,8		130,61	94,59	100

Keterangan tabel :

- c* : bersumber dari hasil penyusunan Neraca Bahan Makanan Tahun 2016
di : $c1/2400 \times 100\%$
e : angka ketetapan
fi : $di \times ei$
gi : Skor AKG dengan memperhatikan Skor Maks, jika Skor AKG lebih tinggi dari Skor Maks maka yang diambil adalah Skor Maks
h : angka ketetapan

Dari tabel diatas, terlihat bahwa Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan di Kota Prabumulih Tahun 2024 berdasarkan Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah sebesar **94,59** yang mana mengalami kenaikan dari tahun 2023 yakni 94,03. Dengan menggunakan skor mutu ideal PPH ketersediaan sebesar 100 maka dapat dikatakan bahwa kualitas pangan yang tersedia di Prabumulih belum memenuhi kaidah gizi yang beragam dan seimbang yang ideal. Hal ini disebabkan kontribusi energi dari masing-masing kelompok pangan masih ada yang kurang, mendekati bahkan ada yang telah melebihi normal ideal PPH ketersediaan.

Adapun kelompok pangan yang kontribusinya sesuai dengan angka ideal PPH yang direkomendasikan yakni berasal dari kelompok pangan hewani, yaitu pangan hewani, minyak dan lemak dan dari kelompok pangan nabati yaitu gula, sedangkan kelompok bahan pangan yang masih dibawah angka ideal yang direkomendasikan terdiri dari kelompok buah/ biji berminyak, padi-padian, kelompok umbi-umbian, kelompok Kacang Kacangan, dan kelompok sayuran dan buah.

Belum tercapainya keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat di Prabumulih ditunjukkan dari konsumsi kelompok padi-padian, kelompok buah/ biji berminyak, kelompok umbi-umbian, dan kelompok sayur-sayuran dan buah yang masih rendah. Hal ini cenderung dipengaruhi oleh :

- a. Masih rendahnya daya beli masyarakat karena pendapatan yang masih rendah
- b. Masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat akan pola pangan beragam bergizi seimbang dan aman.
- c. Masih terbatasnya akses terhadap komoditas pangan
- d. Sistem distribusi pangan yang belum efektif dan efisien
- e. Produksi beberapa komoditas pangan yang masih rendah sehingga ketergantungan pasokan dari luar daerah sangat mempengaruhi harga komoditas pangan di pasaran.

Untuk meningkatkan kualitas pangan yang tersedia maka yang perlu dilakukan adalah meningkatkan keseimbangan ketersediaan energi untuk seluruh kelompok pangan melalui penambahan tingkat ketersediaan energi untuk seluruh kelompok pangan. Untuk mendukung pencapaian target skor mutu pangan tersebut, dibutuhkan ketersediaan komoditas pangan dengan jumlah dan komposisi yang memadai. Untuk dapat mendukung peningkatan kuantitas dan kualitas ketersediaan pangan, perlu diketahui kemampuan produksi pangan Kota Prabumulih. Mengingat potensi Prabumulih di bidang pertanian masih cukup baik maka peningkatan produksi beberapa komoditas pangan seperti kelompok buah/biji berminyak, padi-padian, kelompok umbi-umbian, kelompok Kacang Kacangan, kelompok sayuran dan buahan perlu terus dipacu sehingga dapat mempercepat waktu pencapaian skor normal mutu pangan PPH sebesar 100.

Upaya perbaikan kualitas ketersediaan pangan ini harus ditempuh dengan pendekatan aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Penyediaan pangan diutamakan melalui peningkatan produksi dalam daerah dengan jumlah dan komposisi yang sesuai dengan kebutuhan dan kesukaan konsumen.
- b. Pengembangan sistem distribusi yang efisien dengan jangkauan wilayah pedesaan dan daerah terpencil sehingga harga di pasaran dapat ditekan.
- c. Penciptaan mekanisme daya beli pasar yang mendukung terbentuknya harga yang terjangkau dan mampu memberikan insentif bagi produsen untuk menghasilkan produksi pangan.
- d. Keterlibatan pemerintah dan swasta dalam teknologi pengolahan pangan lokal.

- e. Pemberdayaan kelompok wanita melalui optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan dan pengembangan usaha pengolahan pangan.

1.1.1.2 Sasaran

⇒ Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja

⇒ Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton)

Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun

Capaian indikator kinerja “Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun” tahun 2024 adalah sebesar 9 ton dari target 7,8 Ton yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 115,38 %. Capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota merupakan rangkaian proses pengadaan komoditas beras milik Pemerintah Kota Prabumulih. Mekanisme pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Prabumulih tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Prabumulih dengan Instansi/ lembaga milik negara ataupun swasta yang mengurus masalah pangan untuk Pemerintah Kota Prabumulih dengan Perum BULOG Kanwil Sumsel dan Babel dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kualitas Beras yang disediakan adalah kualitas medium.
- b. Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ditentukan oleh Perum BULOG dimana untuk tahun 2024 ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perum BULOG Kanwil Sumsel Babel Nomor: KD-334/DK000/KU.02.02/12/2023 tentang Harga Jual Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan kepada K/L/D/I Tahun 2023 terhitung mulai tanggal 1 September 2023 adalah Rp. 11.498,-/Kg
- c. Tonase Pembelin disesuaikan dengan anggaran APBD Kota Prabumulih TA. 2024 dengan harga pembelian yang telah ditetapkan oleh Perum BULOG. Total Jumlah Pembelian beras adalah 9.000 Kg dengan total belanja sebanyak Rp. 103.482.000,- (Seratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)

d. Jika terdapat perubahan harga pembelian beras sebelum Perjanjian Kerjasama ditandatangani, maka dalam kontrak/PJB agar dicantumkan klausul addendum penyesuaian harga/kuantum sesuai dengan harga yang berlaku dalam Keputusan Direksi mengenai Penetapan HPB.

Berikut rekapitulasi persediaan beras cadangan pangan pemerintah daerah kota prabumulih di gudang PERUM BULOG KANWIL SUMSEL DAN BABEL tahun 2013 s.d 2024:

Tabel 3.2.2 Rekapitulasi Persediaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Prabumulih di Gudang PERUM BULOG KANWIL SUMSEL DAN BABEL Tahun 2013 – 2024

No	Jenis Kegiatan	Tahun	Volume Beras (Kg)			Harga Satuan (Rp/Kg)	Nilai (Rp)	Stok Akhir Beras (Kg)	Keterangan
			Pengadaan	Penyaluran	Addendum Harga/Vol				
1	Pengadaan	2013	11.610			7.752	89.999.095	11.610	
2	Pengadaan	2014	5.055			8.048	40.681.073	16.665	
3	Pengadaan	2015	4.550			8.790	39.994.500	21.215	
4	Penyaluran	2016		16.425			(128.748.722)	4.790	
5	Pengadaan	2017	4.575			8.725	39.916.875	9.365	
6	Pengadaan	2018	3.885			10.276	39.922.260	13.250	
7	Pengadaan	2019	9.510			10.510	99.950.100	22.760	
8	Pengadaan	2020	9.484			10.543	99.989.812	32.244	
9	Addendum Harga Pengadaan 2020	2023			9.484	11.002	4.353.156	32.244	Nilai merupakan selisih harga pengadaan 2020 dengan harga jual 2023
10	Penyaluran	2023		19.980			(192.497.455)	12.264	
11	Pengadaan	2024	9.000			11.498	103.482.000	21.264	
12	Penyaluran	2024		5000			(53.642.240)	16.264	
13	Addendum Kuantum Pengadaan 2020	2024			792	12.348		15.472	Nilai merupakan selisih harga addendum 2023 dengan harga jual 2024
Jumlah			57.669	41.405	792		183.400.454	15.472	

Untuk mempermudah proses penyaluran perlu dilakukan revisi PERKADA yang ada sebagai dasar hukum dalam proses penyaluran Cadangan

Pangan Pemerintah Daerah karena untuk mengakomodasi peraturan baru dari pemerintah pusat, namun berdasarkan hasil konsultasi dengan Bagian Hukum Setda Kota Prabumulih dan Biro Hukum Setda Provinsi Sumsel sebelum merevisi Perkada harus mempunyai Peraturan Daerah (Perda) tentang Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagai dasar pembuatan Perkada sedangkan Pemerintah Kota Prabumulih belum menyusun Perda tersebut. Direncanakan anggaran Penyusunan Perda Tentang CPPD ditahun anggaran 2025

1.1.1.3 Sasaran

⇒ Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

Indikator Kinerja

⇒ Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Capaian indikator kinerja "Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi" tahun 2024 yaitu sebesar 89,2 dari target 91,2 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 97,81 %.

Tabel 3.2.3 Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi Pangan Penduduk Kota Prabumulih Berdasarkan Data Survey Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2024

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram / kapita/ hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal / kapita	%	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	260,8	1.015	54,3	48,4	0,5	27,2	24,2	25,0	24,2
2	Umbi-umbian	43,7	53	2,8	2,5	0,5	1,4	1,3	2,5	1,3
3	Pangan Hewani	152,6	296	15,9	14,1	2,0	31,7	28,2	24,0	24,0
4	Minyak dan lemak	26,5	239	12,8	11,4	0,5	6,4	5,7	5,0	5,0
5	Buah/Biji berminyak	0,4	2	0,1	0,1	0,5	0,1	0,0	1,0	0,0
6	Kacang-kacangan	20,2	50	2,7	2,4	2,0	5,4	4,8	10,0	4,8
7	Gula	17,3	63	3,4	3,0	0,5	1,7	1,5	2,5	1,5
8	Sayur dan buah	247,7	119	6,4	5,7	5,0	32,0	28,4	30,0	28,4

No	Kelompok Pangan	Berat Pangan Gram / kapita/ hari	Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)							
			Kkal / kapita	%	% AKE	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
9	Lain-lain	51,0	31	1,7	1,5	-	-	-		
	Total		1.869	100	89,0		105,7	94,1	100,0	89,2

Keterangan : *) Angka Kecukupan Energi (AKE) : 2100 Kkal/Kap/Hari

Berdasarkan data Survey Sosial Ekonomi Masyarakat tahun 2024 didapat angka besaran kecukupan gizi konsumsi energi per hari yaitu 1.869 kkal/kapita dengan persentase Angka Kecukupan Energi 89,0% dan pada tahun 2023 yaitu 1.954 kkal / kapita per hari dengan persentase Angka Kecukupan Energi (% AKE) sebesar 93 %. Sementara konsumsi protein pada tahun 2024 angka menunjukkan 58,0 gram per kapita per hari dengan persentase AKE 101,7 dan tahun 2023 sebesar 59.0 gram/kapita per hari dan persentase Angka Kecukupan Energi sebesar 103,6%.

Berdasarkan uraian diatas tingkat kecukupan gizi konsumsi energi terjadi penurunan pada tahun 2024 sebesar 4% hal ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain menurunnya tren konsumsi pangan, gaya hidup, selera, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan tinggi belum menjamin rumah tangga tersebut melaksanakan Pola Pangan Harapan B2SA.

1.1.1.4 Sasaran

⇒ Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan

Indikator Kinerja

⇒ Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan

Capaian indikator kinerja "Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan" tahun 2024 yaitu sebesar 0% dari target 2,7% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah sebesar 100%. Capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Persentase daerah rentan rawan pangan

= Jumlah Desa/Kel Pada Prioritas 1 s/d 3 dibagi jumlah desa/kel di Kota Prabumulih

= 0 desa/kel dibagi 37 desa/kel

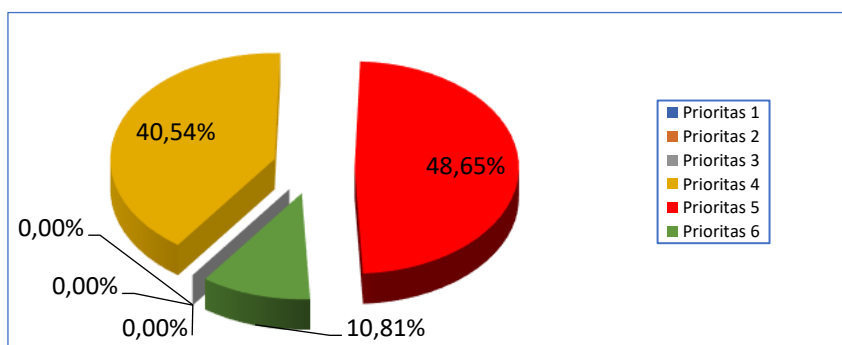
= 0%

Peta komposit menjelaskan kondisi kerentanan terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa dikelompokkan ke dalam 6 prioritas. Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 merupakan prioritas yang relatif lebih tahan pangan. Dengan kata lain, wilayah (desa/kelurahan) prioritas 1 memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar dibandingkan wilayah (desa/kelurahan) lainnya sehingga memerlukan perhatian segera. Meskipun demikian, wilayah (desa/kelurahan) yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rawan pangan, juga sebaliknya wilayah (desa/kelurahan) pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dari 37 desa/kelurahan yang ada di Kota Prabumulih maka didapatkan 0 desa/kelurahan (Prioritas 1), 0 desa/kelurahan (Prioritas 2), 0 desa/kelurahan (Prioritas 3), 15 desa (Prioritas 4), 18 desa/kelurahan (Prioritas 5) dan 4 desa/kelurahan (Prioritas 6).

Tabel 3.2.4 Sebaran Jumlah Desa berdasarkan Prioritas

No	Prioritas	Jumlah Desa	Persentase
1	1	0	0
2	2	0	0
3	3	0	0
4	4	15	40,54
5	5	18	48,65



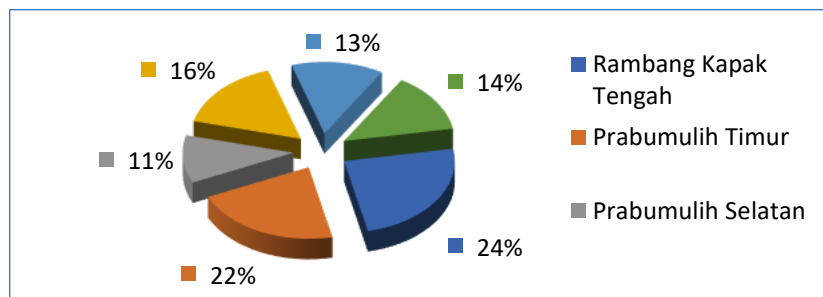
Grafik 3.1 Jumlah Desa /Kel berdasarkan Prioritas Kota Prabumulih 2024

Berdasarkan grafik diatas tidak ada Desa/kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 - 3 yang terdapat di wilayah Kota Prabumulih.

Desa/Kelurahan yang mempunyai ketahanan pangan yang baik dengan prioritas 4 - 6 sebanyak 37 desa Kelurahan yang tesebar di 6 Kecamatan yang tergambar pada tabel berikut :

Tabel 3.2.5 Sebaran Jumlah Desa Prioritas 4 - 6 berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Persentase
1	Prabumulih Barat	6	16
2	Prabumulih Timur	8	22
3	Rambang Kapak Tengah	9	24
4	Cambai	5	13,5
5	Prabumulih Utara	5	13,5
6	Prabumulih Selatan	4	11



Gambar 3.2 Sebaran Jumlah Desa/Kelurahan Priroitas 4 - 6 Per Kecamatan

Desa/Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 1 - 3 secara umum disebabkan oleh :

- a. Jumlah Tenaga Kesehatan tidak berbanding dengan kepadatan Penduduk di wilayah tersebut
- b. Jumlah RT yang tanpa Akses Air Bersih tinggi didaerah yang masuk Prioritas 2 dan 3 dikarenakan belum masuknya Akses PDAM serta untuk daerah tertentu jenis tanah tidak memungkinkan untuk membuat sumur baik sumur gali mapun sumur bor.
- c. Rasio Jumlah Penduduk tingkat kesejahteraan terendah juga merupakan penyebabnya, hal ini diakibatkan dari dampak Covid-19 banyak masyarakat yang berkurang tingkat penghasilannya.

- d. Jumlah Sarana dan Prasarana Penyedia Pangan yang tersedia kurang cukup jumlahnya dibandingkan luas wilayah dan jumlah penduduk di desa/kelurahan tersebut.

Penyebab kerentanan terhadap kerawanan pangan pada suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya, dengan demikian cara penyelesaiannya juga berbeda. Peta ini membantu memahami keadaan diantara wilayah (desa), dan dengan demikian akan membantu para pengambil kebijakan untuk dapat menentukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani isu-isu ketahanan pangan yang relevan di wilayahnya.

Fokus lokasi penanganan kerentanan pangan di wilayah desa diprioritaskan pada:

- a. Desa prioritas 1-3 sudah meningkat ke prioritas 4 – 6 di Kota Prabumulih
- b. Desa-desa yang lokasinya di wilayah yang berbatasan dengan kabupaten lain walaupun secara komposit keseluruhan sudah baik tapi untuk per indikatornya masih kurang baik
- c. Desa-desa pemekaran yang fasilitas, infrastruktur dan kapasitas SDMnya masih terbatas.

Program-program peningkatan ketahanan pangan dan penanganan kerentanan pangan wilayah kabupaten diarahkan pada kegiatan:

- a. Peningkatan penyediaan pangan di daerah non sentra produksi dengan mengoptimalkan sumberdaya pangan lokal.
- b. Pembukaan lahan pertanian pertanian baru
- c. Penanganan kemiskinan melalui penyediaan lapangan kerja, padat karya, redistribusi lahan; pembangunan infrastruktur dasar (jalan, air bersih), dan pemberian bantuan sosial; serta pembangunan usaha produktif/UMKM/padat karya untuk menggerakkan ekonomi wilayah.
- d. Peningkatan akses air bersih melalui penyediaan fasilitas dan layanan air bersih, sosialisasi dan penyuluhan.
- e. Penyediaan tenaga kesehatan yang cukup dan memadai sesuai dengan rasio kebutuhan yang ada di wilayah dan mengoptimalkan sumberdaya kesehatan yang ada.
- f. Penyebar luasan informasi tentang keberadaan atau populasi SDM kesehatan diwilayah yang bisa diakses masyarakat (sebagai rujukan, konsultasi kesehatan maupun penanganan permasalahan kesehatan, seperti : Batra/pengobatan tradisional, fisioterapi, gizi kesehatan, kebidanan dan

kesehatan reproduksi, kesehatan lingkungan dan kedokteran umum dan gigi).

1.1.1.5 Sasaran

⇒ Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman

Indikator Kinerja

⇒ Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan

Pengujian mutu keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dilakukan dengan pengambilan sampel 10 sayuran yaitu **selada, packcoy, tomat, daun bawang, kol, bayam putih, bayam hijau, kacang panjang, kangkung dan cabai merah**. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui residu pestisida pada Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dengan menggunakan Bioeasy Pestisida Residu Rapi Test Kit. Pengujian dengan alat tersebut merupakan cara mudah untuk mendeteksi apakah terdapat zat membahayakan pada tanaman sayuran seperti zat pestisida yang sering digunakan petani untuk mengusir hama daun pada tanaman sayuran. Setelah dilakukan pengujian kita bisa mengetahui apakah sayuran tersebut terdapat cemaran atau layak untuk di konsumsi.

Berikut ini tabel hasil uji tes residu pestida pada sampel sayuran PSAT:

Tabel 3.2.6 Hasil Uji Tes Residu Pestisida Sayuran

No	Pelaku Usaha	Alamat	Komoditas	Hasil Uji Residu Pestisida		Keterangan
				Positif	Negatif	
1	Mutiara Hidroponik	Kelurahan Cambai	Selada	-	✓	Produk dinyatakan aman dikonsumsi
2	Oase Fam Hidroponik	Kelurahan Gunung Ibul	Pakcoy	-	✓	Produk dinyatakan aman dikonsumsi
3	Ayu Hidroponik	Kelurahan Karang Raja	Selada dan Pakcoy	-	✓	Produk dinyatakan aman dikonsumsi
4	Rambang Garden Hidroponik	Kelurahan Tanjung Raman	Selada	-	✓	Produk dinyatakan aman dikonsumsi
5	Berkah Hidroponik	Kelurahan Karang Jaya	Pakcoy dan Selada	-	✓	Produk dinyatakan

No	Pelaku Usaha	Alamat	Komoditas	Hasil Uji Residu Pestisida		Keterangan
						aman dikonsumsi
6	Hidrofresh21	Kelurahan Sukaraja	Tomat, Daun Bawang dan Pakcoy	-	✓	Produk dinyatakan aman dikonsumsi
7	Pasar Tradisional Modern	Kota Prabumulih	Tomat, Kol, Bayam Putih, Bayam Hijau, Kacang Panjang, Kangkung dan Cabe Merah	-	✓	Produk dinyatakan aman dikonsumsi

Hasil tes residu pestisida secara keseluruhan didapat hasil negatif sehingga pangan aman dikonsumsi dan bebas bahan kimia yang berbahaya.

Pengujian mutu keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dilakukan dengan pengambilan sampel buah yaitu **buah nanas** milik Petani Nanas Bapak Marsan Desa Pangkul dan Petani Nanas Bapak Tanto Kelurahan Sungai Medang Kecamatan Cambai Kota Prabumulih. Tim dari Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) Provinsi Sumatera Selatan dan tim Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih datang ke lokasi kebun nanas tersebut untuk mengambil sampel buah nanas, selanjutnya dilakukan uji laboratorium berdasarkan Paket Permentan 53 Nanas ke PT. Saraswanti Indo Genetech di Bogor. Berikut ini tabel hasil uji tes residu pestisida pada sampel buah PSAT:

Tabel 3.2.7 Hasil Uji Tes Residu Pestisida Buah

No	Pelaku Usaha	Alamat	Komoditas	Nomor Sertifikat Prima 3	Hasil Uji residu pestisida		Keterangan
					Positif	Negatif	
1	Tanto	Jl Raya Sungai Medang, Rt/Rw :02/08, Kel Sungai Medang, Kec Cambai Kota Prabumulih	Buah Nanas	SIG.LHP.X.2024.181611591	-	✓	produk dinyatakan aman dikonsumsi/level residu dibawah ambang batas
2	Marsan	Jln Masjid Dusun I Desa Pangkul Kec Cambai Kota Prabumulih	Buah Nanas	SIG.LHP.X.2024.181611592	-	✓	produk dinyatakan aman dikonsumsi/level residu dibawah ambang batas

Hasil tes residu pestisida secara keseluruhan didapat hasil negatif sehingga pangan aman dikonsumsi dan bebas bahan kimia yang berbahaya. Serta tersertifikasi Produk Prima 3 Komoditi Buah Nanas dari petani nanas di Desa Pangkul dan Kelurahan Sungai Medang yang dinyatakan aman dikonsumsi.

Berikut perhitungan persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan:

a. Capaian Pengawasan di Peredaran (Post market):

Realisasi PSAT yang memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu pangan di peredaran (Y)

$$\begin{aligned} &= P/N \times 100\% \\ &= 10/10 \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Ket:

P = Hasil Pengawasan dalam bentuk jumlah sampel/contoh yang memenuhi persyaratan Keamanan Pangan (Ada 10 sampel yang memenuhi syarat)

N = Jumlah pengawasan dalam bentuk jumlah contoh/sampel yang diambil (Ada 10 sampel yaitu selada, packcoy, tomat, daun bawang, kol, bayam putih, bayam hijau, kacang panjang, kangkung dan cabai merah)

Capaian (K)

$$\begin{aligned} &= Y/T \times 100\% \\ &= 100/85 \times 100\% \\ &= 117,6\% \end{aligned}$$

Ket:

Y = Realisasi PSAT yang memenuhi Persyaratan Keamanan dan Mutu pangan di peredaran

T = Target Pengawasan di Peredaran yaitu: Persentase PSAT yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan ditetapkan sebesar 85% (T)

Capaian Tertimbang (**K1**)

$$\begin{aligned} &= \text{Capaian (K)} \times 60\% \\ &= 117,6\% \times 60\% \\ &= 70,56\% \end{aligned}$$

b. Registrasi dan Sertifikasi (pre market)

Capaian Registrasi dan Sertifikasi merupakan penjumlahan antara ijin edar dan sertifikat yang diterbitkan, termasuk SPPB PSAT, rumah kemas, health certificate (HC).

Pada tahun 2024 hanya terdapat 2 buah Sertifikat Produk Prima 3.

Capaian tertimbang (**K2**)

$$= 40\% \times X$$

$$= 40\% \times 20\%$$

$$= 8\%$$

Ket:

Capaian (X), jika:

$$>200 = 100\%$$

$$150 - <200 = 90\%$$

$$100 - <150 = 80\%$$

$$70 - <100 = 60\%$$

$$40 - <70 = 50\%$$

$$10 - <40 = 40\%$$

$$<10 = 20\%$$

c. **CAPAIAN TOTAL**

$$= K1 + K2$$

$$= 70,56\% + 8\%$$

$$= \mathbf{78,56\%}$$

Capaian indikator kinerja "Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan" tahun 2024 yaitu sebesar 78,56% dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kerjanya 78,56%. Capaian ini belum mencapai target yang diperjanjikan. Pada tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan hanya menerbitkan 2 buah Sertifikat Produk Prima 3 yang diberikan kepada Petani Marsan dan Tanto atas komoditi nanas. Hal ini disesuaikan dengan jumlah anggaran yang disediakan untuk biaya pengujian laboratorium komoditi nanas atas uji residu pestisida.

1.4.1.1 Sasaran

⇒ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja

⇒ Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan

⇒ Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

Capaian kinerja indikator "Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan" Tahun 2024 (untuk tahun 2023) yaitu 73,9 dari target 70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 105,70 %. Capaian ini melebihi target yang diperjanjikan.

Evaluasi dilakukan terhadap dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Hasil Evaluasi Internal Kinerja Program, dan Laporan Kinerja, serta dokumen terkait lainnya.

Berikut ini penilaian SAKIP berdasarkan evaluasi manajemen kinerja yaitu:

Tabel 3.2.8 Penilaian SAKIP Tahun 2024 (untuk tahun 2023)

Komponen		Bobot	Nilai hasil evaluasi
a	Perencanaan Kinerja	30	24,08
b	Pengukuran Kinerja	30	27,07
c	Pelaporan Kinerja	15	8,71
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	14,13
TOTAL		100	73,99

Dari hasil evaluasi atas Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih Tahun 2024 (untuk tahun 2023) tersebut diperoleh nilai sebesar 73,9 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 100,00 atau 73,9 dengan kategori BB yaitu interpretasi sangat baik (memadai), dimana akuntabilitas kerjanya sangat baik. Namun demikian masih perlu perbaikan walaupun tidak mendasar.

Capaian kinerja indikator "Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan" adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100%. Capaian ini mencapai target di dalam

perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pada tahun 2024 tidak terdapat temuan hasil pemeriksaan, hanya sekedar pembinaan berkas administrasi.

3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	2024		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	3,01	5.27	3,05	4.71	4,95	5,25
1.1.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	95,50	94,8	94,03	94,1	94,59	100,52
1.1.1.2	Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun	0 Ton	0 Ton	0 Ton	7,8 Ton	9 Ton	115,38
1.1.1.3	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	82,90	85,2	93,1	91,2	89,2	97,81
1.1.1.4	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	29,73%	2,7%	2,7%	2,7%	2,7%	100
1.1.1.5	Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan	Persentase tercapainya konsumsi				100%	78,56%	100

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (2021)	Tahun (2022)	Tahun (2023)	2024		
			Realiasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	yang Sehat dan Aman	pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan						
1.4.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Kota				70	60,86	86,94
1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	71,56	73,6	79,77	70	73,99	105,7
1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1.1.1 Sasaran

⇒ Meningkatkan Ketersediaan Pangan yang Cukup

Indikator Kinerja

⇒ Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Capaian indikator kinerja "Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan" tahun 2024 adalah sebesar 94,59 dari target sebesar 94,1 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100,52%. Capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Namun bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 capaian kinerjanya meningkat dari 94,03 menjadi 94,59.

Adapun kelompok pangan yang kontribusinya sesuai dengan angka ideal PPH yang direkomendasikan yakni berasal dari kelompok pangan

hewani, yaitu pangan hewani, minyak dan lemak dan dari kelompok pangan nabati yaitu gula, sedangkan kelompok bahan pangan yang masih dibawah angka ideal yang direkomendasikan terdiri dari kelompok buah/ biji berminyak, padi-padian, kelompok umbi-umbian, kelompok Kacang Kacangan, dan kelompok sayuran dan buah.

Belum tercapainya keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat di Prabumulih ditunjukkan dari konsumsi kelompok padi-padian, kelompok buah/ biji berminyak, kelompok umbi-umbian, dan kelompok sayur-sayuran dan buah yang masih rendah.

1.1.1.6 Sasaran

⇒ Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja

⇒ Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton)

Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun

Capaian indikator kinerja “Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun” tahun 2024 adalah sebesar 9 ton dari target 7,8 Ton yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 115,38 %. Capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Namun bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar 0 Ton dari target sebesar 13 Ton yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 0%.

Pengadaan cadangan pangan tahun 2023 tidak direalisasikan dikarenakan ada kegiatan penyaluran cadangan pangan yang terdapat pada APBD Perubahan Tahun 2023 serta proses pencairannya berada pada pertengahan bulan November dimana menurut surat dari BULOG Kanwil Sumsel Babel Nomor : B-160.06020.03.2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang izin prinsip penjualan beras untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) tidak dapat melakukan pengadaan sebelum dilakukan penyaluran beras yang telah disimpan/dititipkan di BULOG. Sementara, penyaluran beras tersebut dilaksanakan pada awal bulan Desember tahun 2023, sehingga waktu yang diperlukan untuk melakukan proses pengadaan

cadangan pangan tidak mencukupi waktu dikarenakan telah mencapai batas waktu akhir anggaran tahun 2023.

1.1.1.7 Sasaran

⇒ Meningkatkan Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

Indikator Kinerja

⇒ Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Capaian indikator kinerja "Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi" tahun 2024 yaitu sebesar 89,2 dari target 91,2 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kerjanya adalah sebesar 97,81 %. Namun bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar 93,1 dari target sebesar 85%. Penurunan sebesar 4 % ini dipengaruhi beberapa faktor antara lain menurunnya tren konsumsi pangan, gaya hidup, selera, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan tinggi belum menjamin rumah tangga tersebut melaksanakan Pola Pangan Harapan B2SA.

1.1.1.8 Sasaran

⇒ Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan

Indikator Kinerja

⇒ Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan

Capaian indikator kinerja "Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan" tahun 2024 yaitu sebesar 2,7% dari target 2,7% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kerjanya adalah sebesar 100%. Capaian ini mencapai target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar 2,7% dari target 2,7%, capaian meningkat karena terjadi penurunan Desa/kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan.

1.1.1.9 Sasaran

⇒ Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman

Indikator Kinerja

⇒ Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan

Capaian indikator kinerja "Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan" tahun 2024 yaitu sebesar 78,56 % dari target sebesar 100 % yang direncanakan dalam perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya 78,56 %. Capaian ini belum mencapai target yang diperjanjikan. Pada tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan hanya menerbitkan 2 buah Sertifikat Produk Prima 3 yang diberikan kepada Petani Marsan dan Tanto atas komoditi nanas. Hal ini disesuaikan dengan jumlah anggaran yang disediakan untuk biaya pengujian laboratorium komoditi nanas atas uji residu pestisida.

1.4.1 Sasaran

⇒ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja

⇒ Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan

⇒ Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

Capaian kinerja indikator "Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan" Tahun 2024 (untuk tahun 2023) yaitu 73,9 dari target 70 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 105,70%. Capaian ini melebihi target yang diperjanjikan. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2023 adalah sebesar 79,77 dari target 80, capaian menurun karena masih terdapat kelemahan pada komponen pelaporan kinerja.

Capaian kinerja indikator "Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan" adalah sebesar 100 % dari target sebesar 100% yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100%. Capaian ini mencapai target di dalam

perjanjian Kinerja Tahun 2024. Pada tahun 2024 tidak terdapat temuan hasil pemeriksaan, hanya sekedar pembinaan berkas administrasi.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis DINAS KETAHANAN PANGAN periode 2024-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	4,39	5,25	83,61
1.1.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	94,59	94,60	99,98
1.1.1.2	Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun	9 ton	23,4 ton	38,46%
1.1.1.3	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	89,2	96,8	92,15
1.1.1.4	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	2,7%	0%	100
1.1.1.5	Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman	Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	78,56	100	78,56

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.4.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	70	80	87,5
1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	73,99	78	94,86
1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100%	100%	100%

Sumber : Renstra Tahun 2024-2026 Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1.1.1 Sasaran

⇒ Meningkatkan Ketersediaan Pangan yang Cukup

Indikator Kinerja

⇒ Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan

Capaian indikator kinerja "Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan" tahun 2024 adalah sebesar 94,59 dari target akhir renstra sebesar 94,60 sehingga persentase tingkat kemajuan adalah 99,98%.

Adapun kelompok pangan yang kontribusinya sesuai dengan angka ideal PPH yang direkomendasikan yakni berasal dari kelompok pangan hewani, yaitu pangan hewani, minyak dan lemak dan dari kelompok pangan nabati yaitu gula, sedangkan kelompok bahan pangan yang masih dibawah angka ideal yang direkomendasikan terdiri dari kelompok buah/ biji berminyak, padi-padian, kelompok umbi-umbian, kelompok Kacang Kacangan, dan kelompok sayuran dan buah.

1.1.1.2 Sasaran

⇒ Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja

⇒ Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (ton) minimal 23,4 Ton dalam 3 (tiga) tahun

Capaian indikator kinerja “Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun” tahun 2024 adalah sebesar 9 ton dari target akhir renstra sebesar 23,4 Ton sehingga persentase tingkat kemajuan adalah 38,46%.

1.1.1.3 Sasaran

⇒ Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

Indikator Kinerja

⇒ Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Capaian indikator kinerja "Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi" tahun 2024 yaitu sebesar 89,2 dari target akhir renstra sebesar 96,8 sehingga persentase tingkat kemajuan adalah 92,15%. Jumlah skor PPH konsumsi adalah maksimal 100 dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) 2.100 Kkal/Kap/Hari.

1.1.1.4 Sasaran

⇒ Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan

Indikator Kinerja

⇒ Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan

Capaian indikator kinerja "Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan" tahun 2024 yaitu sebesar 2,7% dari target dari target akhir renstra sebesar 0%. Di capaian akhir renstra diharapkan tidak berada pada prioritas 1 s.d 3 dalam arti tidak ada wilayah (desa/kelurahan) yang memiliki tingkat resiko kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih kecil.

1.1.1.5 Sasaran

⇒ Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman

Indikator Kinerja

⇒ Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan

Capaian indikator kinerja "Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan" tahun 2024 yaitu sebesar 78,56 % dari target akhir renstra sebesar 100 %. Sehingga persentase tingkat kemajuan adalah 78,56%. Pada akhir renstra diharapkan jumlah ijin edar dan sertifikat yang diterbitkan meningkat serta didukung dengan jumlah anggaran yang tercukupi sehingga tercapainya target konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan.

1.4.2 Sasaran

⇒ Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Indikator Kinerja

⇒ Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan

⇒ Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

Capaian kinerja indikator "Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan" Tahun 2024 (untuk tahun 2023) yaitu 73,9 dari target akhir renstra 78. Sehingga persentase tingkat kemajuan adalah 94,86%.

Capaian kinerja indikator "Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan" adalah sebesar 100% dari target akhir renstra sebesar 100%. Sehingga persentase tingkat kemajuan adalah 100%.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	4,71	4,39	93,2		
1.1.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	94,1	94,59	100,52	Kelompok pangan yang kontribusinya sesuai dengan angka ideal PPH yang direkomendasikan yakni berasal dari kelompok pangan hewani, yaitu pangan hewani, minyak dan lemak dan dari kelompok pangan nabati yaitu gula, sedangkan kelompok bahan pangan yang masih dibawah angka ideal yang direkomendasikan terdiri dari kelompok buah/ biji berminyak, padi-padian, kelompok umbi-umbian, kelompok Kacang Kacangan, dan kelompok sayuran dan buah.	
1.1.1.2	Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun	7,8	9	115,38	Harga Pembelian Pemerintah (HPP) ditentukan oleh Perum BULOG dimana untuk tahun 2024 ini sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perum BULOG Kanwil Sumsel Babel Nomor : KD-334/DK000/KU.02.02/12/2023 tentang Harga Jual Beras Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Kebutuhan Kegiatan Penjualan kepada K/L/D/I Tahun 2023 terhitung mulai tanggal 1 September 2023 adalah Rp. 11.498,-/Kg. Tonase Pembelin disesuaikan dengan	

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						anggaran APBD Kota Prabumulih TA. 2024 dengan harga pembelian yang telah ditetapkan oleh Perum BULOG. Total Jumlah Pembelian beras adalah 9.000 Kg dengan total belanja sebanyak Rp. 103.482.000. Jika terdapat perubahan harga pembelian beras sebelum Perjanjian Kerjasama ditandatangani, maka dalam kontrak/PJB agar dicantumkan klausul addendum penyesuaian harga/kuantum sesuai dengan harga yang berlaku dalam Keputusan Direksi mengenai Penetapan HPB.	
1.1.1.3	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	91,2	89,2	97,8	Menurunnya tren konsumsi pangan, gaya hidup, selera, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan tinggi belum menjamin rumah tangga tersebut melaksanakan Pola Pangan Harapan B2SA.	Faktor yang berpengaruh terhadap pola pangan harapan adalah jumlah pengeluaran rumah tangga, besaran anggota keluarga dan tingkat pendidikan
1.1.1.4	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	2,7	2,7	100	Tidak ada Desa/kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan prioritas 1 - 3 yang terdapat di wilayah Kota Prabumulih	
1.1.1.5	Meningkatnya Keragaman Konsumsi	Persentase tercapainya konsumsi	100	78,56	78,56	Hasil tes residu pestisida secara keseluruhan didapat hasil negatif sehingga pangan	Jumlah anggaran yang

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Pangan yang Sehat dan Aman	pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan				aman dikonsumsi dan bebas bahan kimia yang berbahaya. Namun tidak tercapainya indikator kinerja tersebut dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan hanya menerbitkan 2 buah Sertifikat Produk Prima 3 yang diberikan kepada Petani Marsan dan Tanto atas komoditi nanas. Hal ini disesuaikan dengan jumlah anggaran yang disediakan untuk biaya pengujian laboratorium komoditi nanas atas uji residu pestisida.	disediakan tercukupi untuk biaya pengujian laboratorium komoditi nanas atas uji residu pestisida.
1.4.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	70	60,86	86,94		
1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	70	73,99	105,7	Kategori BB yaitu interpretasi sangat baik (memadai), dimana akuntabilitas kinerjanya sangat baik.	Evaluasi dan Perbaikan Kinerja
1.4.1.1		Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100	100	100	Tidak terdapat temuan hasil pemeriksaan, hanya sekedar pembinaan berkas administrasi	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1.1.1.3 Sasaran

⇒ Meningkatkan Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman

Indikator Kinerja

⇒ Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi

Menurunnya tren konsumsi pangan, gaya hidup, selera, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan tinggi belum menjamin rumah tangga tersebut melaksanakan Pola Pangan Harapan B2SA. Faktor yang berpengaruh terhadap pola pangan harapan adalah jumlah pengeluaran rumah tangga, besaran anggota keluarga dan tingkat pendidikan.

Faktor – faktor internal yang mempengaruhi konsumsi, besar kecilnya konsumsi yang dilakukan seseorang dipengaruhi oleh :

- Pendapatan
- Perkiraan harga dimasa mendatang
- Harga barang yang bersangkutan
- Iklan
- Ketersediaan barang dan jasa
- Selera
- Mode
- Jumlah keluarga.

Faktor – faktor eksternal yang mempengaruhi pola konsumsi adalah :

- Kebudayaan dan status sosial
- Kebudayaan dan pendapatan
- Pendapatan dan selera
- Status sosial dan motivasi
- Harga dan pendapatan

1.1.1.5 Sasaran

⇒ Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)

Indikator Kinerja

⇒ Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan

Hasil tes residu pestisida secara keseluruhan didapat hasil negatif sehingga pangan aman dikonsumsi dan bebas bahan kimia

yang berbahaya. Namun tidak tercapainya indikator kinerja tersebut dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan hanya menerbitkan 2 buah Sertifikat Produk Prima 3 yang diberikan kepada Petani Marsan dan Tanto atas komoditi nanas. Hal ini disesuaikan dengan jumlah anggaran yang disediakan untuk biaya pengujian laboratorium komoditi nanas atas uji residu pestisida.

Solusi yang dilakukan agar meningkatnya persentase PSAT yaitu memperbanyak jumlah izin edar dan sertifikat yang diterbitkan. Untuk itu jumlah anggaran yang disediakan tercukupi untuk biaya pengujian laboratorium komoditi nanas atas uji residu pestisida.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	4,71	4,39	93,2	799.300.000	719.826.609	90,06	
1.1.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	94,1	94,59	100,52	334.300.000	313.886.036	93,89	6,63
1.1.1.2	Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah	7,8	9	115,38	135.000.000	128.364.000	95,08	20,3
1.1.1.3	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi	91,2	89,2	97,8	180.000.000	133.972.909	74,43	23,37

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Seimbang dan Aman (B2SA)							
1.1.1.4	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	2,7	2,7	100	110.000.000	105.544.864	95,95	4,05
1.1.1.5	Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman	100	78,56	78,56	40.000.000	38.058.800	95,15	16,58
1.4.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	70	60,86	86,94				
1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	70	73,99	105,7	3.000.000	2.988.000	99,6	6,1
1.4.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100	3.860.911.700	3.212.933.526	83,22	16,78

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan rumusan efisiensi sumber daya pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214 Tahun 2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi perencanaan.

Data yang dibutuhkan untuk mengukur efisiensi keluaran kegiatan meliputi capaian keluaran kegiatan, pagu anggaran, dan realisasi anggaran. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran

dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dengan menggunakan rumus:

E : Efisiensi PAKi : Pagu anggaran keluaran I

RAKi : Realisasi anggaran keluaran I

Cki : Capaian keluaran I

Nilai hasil rata-rata penghitungan efisiensi yang didapatkan oleh Dinas Ketahanan Pangan yaitu sebesar:

$$= 16,78\% + 6,1\% + 16,58\% + 4,05\% + 23,37\% + 20,3\% + 6,63\%$$

$$= 93,81\% / 7$$

$$= \mathbf{13,4\%}$$

Sejalan dengan ketentuan PMK Nomor 214 /PMK.02/2017 Tahun 2017, bahwa batas maksimal nilai efisiensi adalah 20% dan batas minimal efisiensi adalah -20%, maka dapat dikatakan penggunaan sumber daya di Dinas Ketahanan Pangan masuk dalam **kategori efisien**. Untuk itu dapat disimpulkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan telah secara efisien dalam menggunakan sumber daya anggaran guna mencapai kinerja yang baik dan optimal pada tahun 2024.

3.1.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.1.1	Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Industri	Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan	4,39				Menunjang	
1.1.1.1.1	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	100,59	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100	Menunjang	
1.1.1.1.1.1				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100	Menunjang	
1.1.1.1.1.1.1				Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	100	Menunjang	
1.1.1.1.1.1.2				Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100	Menunjang	
1.1.1.1.1.1.3				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100	Menunjang	
1.1.1.1.1.1.4				Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan harga pangan tingkat produsen	100	Menunjang	
1.1.1.1.1.1.5				Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	100	Menunjang	
1.1.1.1.1.1.6				Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	100	Menunjang	
1.1.1.1.1.1.7				Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Kabupaten/Kota			
1.1.1.1.1.1.8				Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	100	Menunjang	
1.1.1.1.1.1.9				Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	100	Menunjang	
1.1.1.2.1	Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun	115,3	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.1				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Pemerintah Kota	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.1.2				Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/kota	100	Menunjang	
1.1.1.2.1.1.4				Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	100	Menunjang	
1.1.1.3.1	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	97,81	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100	Menunjang	
1.1.1.3.1.1				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/ Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Tercapainya Target Konsumsi Pangan Yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman	100	Menunjang	
1.1.1.3.1.1.1				Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	100	Menunjang	
1.1.1.3.1.1.2				Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman	100	Menunjang	
1.1.1.4.1	Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan	Persentase menurunnya daerah	100	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		rentan rawan pangan						
1.1.1.4.1.1				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Tersedianya Peta Daerah Rawan Pangan	100	Menunjang	
1.1.1.4.1.1.1				Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	100	Menunjang	
1.1.1.4.1.2				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase Tertanganinya Daerah Rentan Rawan Pangan	100	Menunjang	
1.1.1.4.1.2.1				Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang	
1.1.1.5.1	Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman	Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	78,56	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100	Menunjang	
1.1.1.5.1.1				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan	100	Menunjang	
1.1.1.5.1.1.1				Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang	
1.1.1.5.1.1.2				Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	100	Menunjang	
1.1.1.5.1.1.3				Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.1	Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP Kota	86,94				Menunjang	
1.4.1.1.1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	105,7	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.1				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja perangkat daerah disampaikan tepat waktu	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.1.1				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.1.2				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.1.3				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.1.4				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.1.5				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang	
1.4.1.1.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan disampaikan Tepat Waktu			
1.4.1.1.2.1				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang	
1.4.1.1.2.2				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.1.1.1.2.3				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.2.4				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.3				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen BMD yang Disampaikan Tepat Waktu	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.3.1				Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.4				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.4.1				Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	90	Menunjang	
1.4.1.1.1.4.2				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.5				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi umum Perkantoran	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.5.1				Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.5.2				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.5.3				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.5.5				Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.5.6				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang	

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.1.1.1.6				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi dengan efektif dan efisien	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.6.1				Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.6.2				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.6.3				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.6.4				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.7				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dengan efektif dan efisien	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.7.1				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.8				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.8.1				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	Menunjang	
1.4.1.1.1.8.2				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Menunjang	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2024

Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tahun 2024 melaksanakan 4 program yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Pelaksanaan Kegiatan sampai Tahun 2024 sebagai implementasi dari pencapaian sasaran yang ditetapkan, digambarkan dalam bentuk analisis kinerja pelayanan yang memuat atau mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Dinas Ketahanan Pangan tahun 2024- 2026. Selanjutnya dilakukan analisa terhadap target dan realisasi indikator tujuan dan sasaran.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta penyelenggaraan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kota prabumulih selama tahun anggaran 2024 telah dilakukan secara optimal dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada dan tanpa mengabaikan ketentuan perundang undangan yang berlaku. Optimalnya kinerja yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dapat terlihat dari rata-rata persentase capaian kinerja Program dan Kegiatan rata-rata persentase capaian kinerjanya berkisar antara 90% – 100% yang berarti termasuk kategori penilaian sangat baik.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.1.1.1.1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	334.300.000	313.886.036	93,89
1.1.1.1.1.1	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	334.300.000	313.886.036	93,89
1.1.1.1.1.1.1	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	35.000.000	32.480.000	92,80
1.1.1.1.1.1.2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	3.000.000	2.940.000	98,00
1.1.1.1.1.1.3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	60.000.000	58.995.000	98,32
1.1.1.1.1.1.4	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	175.000.000	163.094.500	93,20
1.1.1.1.1.1.6	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota	15.000.000	13.860.500	92,40
1.1.1.1.1.1.7	Pemantauan Stok Pangan	10.000.000	9.171.000	91,71
1.1.1.1.1.1.8	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	11.300.000	8.581.036	75,94
1.1.1.1.1.1.9	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	10.000.000	9.839.000	98,39
1.1.1.1.1.1.10	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)	15.000.000	14.925.000	99,50
1.1.1.2.1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	135.000.000	128.364.000	95,08
1.1.1.2.1.1	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	135.000.000	128.364.000	95,08
1.1.1.2.1.1.2	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	120.000.000	115.346.000	96,12
1.1.1.2.1.1.4	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	15.000.000	13.018.000	86,79
1.1.1.3.1	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	180.000.000	133.972.909	74,43
1.1.1.3.1.1	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun	180.000.000	133.972.909	74,43

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi			
1.1.1.3.1.1.1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	30.000.000	26.160.371	87,20
1.1.1.3.1.1.2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	150.000.000	107.812.538	71,88
1.1.1.4.1	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	110.000.000	105.544.864	95,95
1.1.1.4.1.1	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	25.000.000	24.020.864	96,08
1.1.1.4.1.1.1	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	25.000.000	24.020.864	96,08
1.1.1.4.1.2	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	85.000.000	81.524.000	95,91
1.1.1.4.1.2.1	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	85.000.000	81.524.000	95,91
1.1.1.5.1	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	40.000.000	38.058.800	95,15
1.1.1.5.1.1	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	38.058.800	95,15
1.1.1.5.1.1.1	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	14.403.800	96,03
1.1.1.5.1.1.3	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	13.870.000	92,47
1.1.1.5.1.1.4	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	10.000.000	9.785.000	97,85
1.4.1.1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.863.911.700	3.215.921.526	83,23
1.4.1.1.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.000.000	2.988.000	99,60
1.4.1.1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	500.000	497.000	99,40
1.4.1.1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	500.000	497.000	99,40
1.4.1.1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	500.000	497.000	99,40

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.1.1.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	500.000	497.000	99,40
1.4.1.1.1.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.000.000	1.000.000	100,00
1.4.1.1.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.105.209.000	2.519.007.025	81,12
1.4.1.1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.069.279.000	2.483.213.025	80,91
1.4.1.1.1.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	34.930.000	34.800.000	99,63
1.4.1.1.1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	500.000	497.000	99,40
1.4.1.1.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	500.000	497.000	99,40
1.4.1.1.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.200.000	7.200.000	100,00
1.4.1.1.1.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.200.000	7.200.000	100,00
1.4.1.1.1.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	26.940.000	20.280.000	75,28
1.4.1.1.1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	20.000.000	17.720.000	88,60
1.4.1.1.1.4.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	6.940.000	2.560.000	36,89
1.4.1.1.1.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	414.870.000	405.813.756	97,82
1.4.1.1.1.5.1	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	5.000.000	4.493.000	89,86
1.4.1.1.1.5.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	11.000.000	7.974.000	72,49
1.4.1.1.1.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.000.000	5.993.250	85,62
1.4.1.1.1.5.5	Penyediaan Bahan/Material	11.870.000	9.198.000	77,49
1.4.1.1.1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	380.000.000	378.155.506	99,51
1.4.1.1.1.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	140.400.000	139.531.000	99,38
1.4.1.1.1.6.2	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	96.960.000	96.425.000	99,45
1.4.1.1.1.6.3	Pengadaan Mebel	25.440.000	25.336.000	99,59
1.4.1.1.1.6.4	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.000.000	17.770.000	98,72
1.4.1.1.1.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.000.000	2.000.000	100,00

No.	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.1.1.1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000	2.000.000	100,00
1.4.1.1.1.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	164.292.700	119.101.745	72,49
1.4.1.1.1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	157.142.700	113.341.745	72,13
1.4.1.1.1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.150.000	5.760.000	80,56

Sumber : LRA Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan

Berdasarkan tabel diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan Anggaran Rp 649.300.000 dan terealisasi Rp 576.222.945 atau sebesar 88,75%.
2. Program Penanganan Kerawanan Pangan Rp 110.000.000 dan terealisasi Rp 105.544.864 atau sebesar 95,95%.
3. Program Pengawasan Keamanan Pangan Rp 40.000.000 dan terealisasi Rp 38.058.800 atau sebesar 95,15%.
4. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diampu oleh Sekretariat dengan Anggaran Rp 3.863.911.700 dan terealisasi Rp 3.215.921.526 atau sebesar 83,23%.

Dapat disimpulkan bahwa Capaian Kinerja dalam Sasaran tersebut sangat baik. Menunjukkan bahwa Perencanaan Kinerja sudah dilakukan dengan terencana. Secara umum pelaksanaan dan serapan anggaran APBD Tahun Anggaran 2024, tidak ada permasalahan. Kegiatan-kegiatan diselesaikan secara tepat waktu dan sesuai dengan target dan perencanaan. Realisasi fisik untuk semua kegiatan hampir mencapai 100%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2024. Penyusunan LKjIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) DINAS KETAHANAN PANGAN Tahun 2024 ini dapat menggambarkan kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. DINAS KETAHANAN PANGAN 6 sasaran strategis dengan 7 Indikator Sasaran tercapai dan 1 Indikator Sasaran tidak tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN adalah:
 - a. Menurunnya tren konsumsi pangan, gaya hidup, selera, tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan tinggi belum menjamin rumah tangga tersebut melaksanakan Pola Pangan Harapan B2SA
 - b. Hasil tes residu pestisida secara keseluruhan didapat hasil negatif sehingga pangan aman dikonsumsi dan bebas bahan kimia yang berbahaya. Namun tidak tercapainya indikator kinerja tersebut dikarenakan Dinas Ketahanan Pangan hanya

menerbitkan 2 buah Sertifikat Produk Prima 3 yang diberikan kepada Petani Marsan dan Tanto atas komoditi nanas. Hal ini disesuaikan dengan jumlah anggaran yang disediakan untuk biaya pengujian laboratorium komoditi nanas atas uji residu pestisida.

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh DINAS KETAHANAN PANGAN adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan penyuluhan, sosialisasi, edukasi dan promosi tentang pola Konsumsi pangan beragam, bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) kepada masyarakat dan Diversifikasi Pangan dan Gizi masyarakat terutama kepada produk non beras dan terigu;
2. Dirasakan sangat penting untuk peningkatan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Segar, Registrasi, Rekomendasi dan Sertifikasi produk pangan segar di Tahun Anggaran selanjutnya.
3. Sosialisasi, bimbingan teknis terhadap penerapan Sistem AKIP kepada instansi pemerintah pusat maupun daerah yang dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk lebih meningkatkan kualitas dan memperkuat implementasi Sistem AKIP
4. Melaksanakan evaluasi LAKIP dengan tujuan menilai kualitas implementasi Sistem AKIP dan menilai kinerja instansi pemerintah serta mendorong perbaikan kualitas implementasi sistem AKIP
5. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan diatas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja DINAS KETAHANAN PANGAN kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Prabumulih, 14 Januari 2025
Plt. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN



Sumarti,SP,M.Si
NIP. 197403012003122003

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SURANTI, SP**

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ELMAN, ST., MM**

Jabatan : Pj. Walikota Prabumulih

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
Pj. Walikota Prabumulih

Pihak Pertama,
Kepala Dinas Ketahanan Pangan


H. ELMAN, ST., MM


SURANTI, SP
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19640325 198708 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Nama OPD : Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih
 Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	B (60-70)
		Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	100 %
2	Meningkatkan Ketersediaan Pangan yang Cukup	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Ketersediaan	94,1
3	Meningkatnya Konsumsi Pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA)	Skor Pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	91,2
4	Tersedianya Cadangan Pangan Beras Pemerintah Daerah	Jumlah Cadangan Pangan Beras Pemerintah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (Tiga) Tahun	7,8 Ton

No	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota /	Rp 3.492.894.799
2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 428.000.000
3	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 25.000.000
4	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 40.000.000
Total		Rp 3.985.894.799

Prabumulih, Januari 2024

Pihak Kedua,
 Pj. Walikota Prabumulih

Pihak Pertama,
 Kepala Dinas Ketahanan Pangan


 H. ELMAN, ST., MM


 SURANTI, SP
 Pembina Tk. I / IV.b
 NIP. 19640325 198708 2 001

Lampiran 2 Matriks Renstra (5 tahun)

Tabel 4.1 (TC.37) Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kota Probolinggo Tahun 2024-2026

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD					
			Kode Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
1	Meningkatnya Nilai SAKIP OPD	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah			Nilai SAKIP	B (60.70)		BB (71.75)		A (76.88)		A (76.88)					
					Nilai SAKIP	B (60.70)		BB (71.75)		A (76.88)		A (76.88)					
					Persentase Tingkat Laju Terwujud Hasil Pengawasan	100%		100%		100%		100%					
			X	XX	01		Program Peningkat Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penuhuan Kebutuhan Administrasi Perkantoran dikumpulkan tepat waktu	100%	3.743.526.788	100%	4.444.526.788	100%	3.986.865.270	100%	12.178.118.830	
			X	XX	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja PD dikumpulkan tepat waktu	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	14.000.000	100%	42.500.000	
			X	XX	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RD/DA)	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	3 Dokumen	4.500.000
			X	XX	01	2.01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	3 Dokumen	4.500.000
			X	XX	01	2.01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	3 Dokumen	4.500.000
			X	XX	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	1 Dokumen	1.500.000	3 Dokumen	4.500.000
			X	XX	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	8.500.000	1 Dokumen	8.000.000	1 Dokumen	8.000.000	3 Dokumen	24.500.000
X	XX	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Laporan Keuangan dikumpulkan Tepat Waktu	100%	2.408.326.788	100%	2.408.326.788	100%	3.147.865.270	100%	8.974.518.830			
X	XX	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan Pegawai	35 Orang/Bulan	2.900.526.788	23 Orang/Bulan	2.850.526.788	30 Orang/Bulan	3.110.065.270	88 Orang 36 Bulan	8.961.118.830			
X	XX	01	2.02	0003	Pelaksanaan Pembelian dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Pembelian dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen	34.800.000	1 Dokumen	34.800.000	1 Dokumen	34.800.000	3 Dokumen	104.400.000			

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
			Kode Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
X	XX	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.500.000	3 Laporan	4.500.000
X	XX	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.500.000	1 Laporan	1.500.000	3 Laporan	4.500.000
X	XX	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Barang Milik Daerah yang Disampaikan Tepat Waktu	100%	7.200.000	100%	18.000.000	100%	18.000.000	100%	43.200.000
X	XX	01	2.03	0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	7.200.000	1 Laporan	18.000.000	1 Laporan	18.000.000	3 Laporan	43.200.000
X	XX	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	35.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	125.000.000
X	XX	01	2.05	0002	Pengadaan Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	30 Paket	25.000.000	30 Paket	25.000.000	30 Paket	25.000.000	90 Paket	75.000.000
X	XX	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berprestasi Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 orang	10.000.000	2 orang	20.000.000	2 orang	20.000.000	15 orang	50.000.000
X	XX	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi umun Perkantoran	100%	365.000.000	100%	446.000.000	100%	462.000.000	100%	1.263.000.000
X	XX	01	2.06	0003	Penyediaan Perakitan Rumah Tangga	Jumlah Paket Perakitan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	1 Paket	5.000.000	1 Paket	11.000.000	3 Paket	28.000.000
X	XX	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	3 Paket	30.000.000
X	XX	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	15.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	3 Paket	35.000.000
X	XX	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	30.000.000
X	XX	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket	20.000.000	1 Paket	11.000.000	1 Paket	11.000.000	3 Paket	42.000.000
X	XX	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	400.000.000	2 Laporan	400.000.000	6 Laporan	1.100.000.000
						Rincian								
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (jumlah OH untuk Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah)	1 Laporan	370.000.000	1 Laporan	370.000.000	1 Laporan	370.000.000	3 Laporan	1.010.000.000

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD		
			Kode Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
						Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi (GKPD) (Jumlah OH Untuk Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah)	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	3 Laporan	90.000.000
			X XX 01 2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah yang terpenuhi dengan efektif dan efisien	100%	280.000.000	100%	350.000.000	100%	130.000.000	100%	1.180.000.000	
			X XX 01 2.07 0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	0	1 Unit	600.000.000	-	-	1 Unit	600.000.000	
			X XX 01 2.07 0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	50.000.000	4 Unit	50.000.000	4 Unit	65.000.000	12 Unit	185.000.000	
			X XX 01 2.07 0006	Pengadaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Perlatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit	50.000.000	3 Unit	50.000.000	4 Unit	65.000.000	10 Unit	165.000.000	
			X XX 01 2.07 0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	100.000.000	1 Unit	150.000.000,00	-	0	1 Unit	250.000.000	
			X XX 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi dengan efektif dan efisien	100%	3.500.000	100%	3.200.000	100%	3.200.000	100%	9.900.000	
			X XX 01 2.08 01	Penyediaan Jasa surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Material)	1 Laporan	3.500.000	1 Laporan	3.200.000	1 Laporan	3.200.000	3 Laporan	9.900.000	
			X XX 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	180.000.000	100%	540.000.000	
			X XX 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19 unit	170.000.000	19 unit	170.000.000	19 unit	170.000.000	57 Unit	510.000.000	
			X XX 01 2.09 06	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	10.000.000	7 Unit	10.000.000	7 Unit	10.000.000	21 Unit	30.000.000	
2	Pemantapan Ketahanan Pangan di Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Pangan yang Cukup			Indikator Pencapaian Pokok Pangan (IPP) Ketersediaan	94,1		94,3		94,5		94,6		
			2 09 03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Tereplemennya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	100%	1.737.000.000	100%	1.862.000.000	100%	1.885.000.000	100%	5.484.000.000	
			2 09 03 2.01	Penyediaan dan Penyehatan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Terlaksananya Pengawasan Penyediaan dan Penyehatan Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100%	802.000.000	100%	836.000.000	100%	1.020.000.000	100%	2.552.000.000	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD					
			Kode Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	50.000.000	3 Laporan	200.000.000
			2	09	03	2.01	0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan pangan Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	50.000.000	3 Laporan	75.000.000
			2	09	03	2.01	0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100 Keluarga	150.000.000	100 Keluarga	150.000.000	100 Keluarga	150.000.000	300 Keluarga	450.000.000
			2	09	03	2.01	0008	Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Stabilitas Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	3 Laporan	950.000.000
			2	09	03	2.01	0009	Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis Sumber Daya Lokal	-	-	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	200.000.000	2 Laporan	300.000.000
			2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	1 Unit	30.000.000	1 Unit	25.000.000	1 Unit	25.000.000	3 Unit	80.000.000
			2	09	03	2.01	0011	Pemantauan Stok Pangan	Informasi Stok Pangan	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	150.000.000
			2	09	03	2.01	0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	1 Laporan	77.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	65.000.000	3 Laporan	207.000.000
			2	09	03	2.01	0015	Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan	Informasi Harga dan Pasokan Pangan	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	1 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	150.000.000
			2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBSM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBSM)	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	3 Laporan	90.000.000
			2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Penetapan Terlaksananya Pengawasan Penetapan dan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	15.000.000	100%	45.000.000
			2	09	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	1 Laporan	15.000.000	3 Laporan	45.000.000
		Terdapatnya Cadangan Pangan Pemerintah Daerah							Jumlah Cadangan Pangan Beres Pemerintah Daerah dalam (Ton) Minimal 23,4 Ton dalam 3 (tiga) Tahun	7,8 ton		7,8 ton		7,8 ton		23,4 ton	

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD	
			Kode Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
						1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	150.000.000	3 Laporan	400.000.000
			2 09 03 2.04 0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	27.000.000	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	107.000.000
		Menurunnya Daerah Rentan Rawan Pangan			Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	2,7%		0%		0%		0%	
			2 09 04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan	2,7%	345.000.000	2,7%	295.000.000	2,7%	395.000.000	2,7%	1.035.000.000
			2 09 04 2.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Persentase Tersedianya Peta Daerah Rawan Pangan	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	45.000.000	100%	135.000.000
			3 09 04 2.01 0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	45.000.000	1 Dokumen	45.000.000	3 Dokumen	135.000.000
			2 09 04 2.02	Pengawasan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase Tertanganinya Daerah Rentan Rawan Pangan	100%	300.000.000	100%	250.000.000	100%	350.000.000	100%	900.000.000
			2 09 04 2.02 0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengeloaan, dan Penyeluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengeloaan, dan Penyeluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	250.000.000	1 Dokumen	300.000.000	3 Dokumen	900.000.000
		Meningkatnya Keragaman Konsumsi Pangan yang Sehat dan Aman			Persentase tercapainya konsumsi pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100%		100%		100%		100%	
			2 09 05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100%	110.000.000	100%	120.000.000	100%	150.000.000	100%	380.000.000
			2 09 05 2.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	100%	110.000.000	100%	120.000.000	100%	150.000.000	100%	380.000.000
			2 09 05 2.01 0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	70.000.000

NO	TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA				2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD					
			Kode Sub Kegiatan	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
			2	09	05	2.01	0006	Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	70.000.000
			2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	75.000.000
			2	09	05	2.01	0008	Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	25.000.000	1 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	75.000.000
			2	09	05	2.01	0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000	3 Dokumen	90.000.000
TOTAL											5.935.526.780		6.721.526.780		6.420.065.270		19.077.118.830



Pepala Dinas Ketahanan Pangan.

Suranti, SP

Pembina TK. I / IV.b

NIP. 19640325 198708 2 001

Lampiran 4 LHE SAKIP Nama Perangkat Daerah



PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH INSPEKTORAT

GEDUNG PERKANTORAN PEMERINTAH KOTA PRABUMULIH LT. 7 & 8
JL. JENDERAL SUDIRMAN KM. 12 KEC. CAMBAI KODE POS 31141
TELP. (0713) 3920011 EXT. 6704 FAKS. (0713) 3920019 e-mail: inspektorat@kotaprabumulih.go.id
PRABUMULIH – SUMATERA SELATAN

Prabumulih, 31 Oktober 2024

Nomor : 700/ *AAG.C* /Inspektorat.II/2024
Sifat : Rahasia
Lamp. : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja OPD di Lingkungan Pemerintah
Kota Prabumulih Tahun 2023

Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Prabumulih

di -
Prabumulih

Berdasar Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Tugas Inspektur atas nama Pj. Walikota Prabumulih Nomor: 700/307/ST/Inspektorat.II/2024 tanggal 22 Juli 2024 telah dilaksanakan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih dengan hasil yang dapat disajikan sebagai berikut:

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih, dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja OPD;
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja OPD;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas OPD;
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Evaluasi dilakukan terhadap dokumen Rencana Strategis, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja, Laporan Hasil Evaluasi Internal Kinerja Program, dan Laporan Kinerja OPD, serta dokumen terkait lainnya.
4. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100, bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih memperoleh nilai sebesar **73,99** dengan kategori **BB** yaitu Interpretasi Sangat Baik (Memadai), dimana akuntabilitas kerjanya sangat baik. Namun demikian masih perlu perbaikan

walaupun tidak mendasar.

5. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. **Perencanaan Kinerja**, memperoleh nilai sebesar 24,08
Berdasar hasil evaluasi, pada komponen perencanaan kinerja sudah cukup optimal.
 - b. **Pengukuran Kinerja**, memperoleh nilai sebesar 27,07
Berdasar hasil evaluasi, pada komponen pengukuran kinerja masih terdapat kelemahan, yaitu:
 - 1) Pengukuran Kinerja dalam pengumpulan data belum dapat mendukung capaian kinerja yang diharapkan;
 - c. **Pelaporan Kinerja**, memperoleh nilai sebesar 8,71
Berdasar hasil evaluasi, pada komponen pelaporan kinerja masih terdapat kelemahan-kelemahan, yaitu:
 - 1) Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah;
 - 2) Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya;
 - 3) Laporan Kinerja belum menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja);
 - 4) Laporan Kinerja belum menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
 - 5) Penyajian Informasi dalam Laporan Kinerja belum menjadi keperdulian seluruh pegawai;
 - 6) Informasi dalam Laporan Kinerja berkala belum digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja;
 - 7) Informasi dalam Laporan Kinerja belum digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja;
 - 8) Informasi dalam Laporan Kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi beikutnya;
 - 9) Informasi Laporan Kinerja tidak selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
 - d. **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**, memperoleh nilai sebesar 14,13
Berdasar hasil evaluasi, pada komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, masih terdapat kelemahan, yaitu:
 - 1) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi);

- 2) Belum menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja;
 - 3) *Belum terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja;*
 - 4) Belum terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja.
 - 5) Belum dapat mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja;
 - 6) Belum terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja;
6. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih, agar melakukan perbaikan sebagai berikut:
- 1) Mengumpulkan data kinerja yang relevan sebagai ukuran capaian kinerja;
 - 2) Menyusun Laporan Kinerja yang memuat informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, dan target kinerja tahun – tahun sebelumnya;
 - 3) Menyusun Laporan Kinerja yang memuat perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja);
 - 4) Menyusun Laporan Kinerja yang memuat kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
 - 5) Menyajikan informasi dalam Laporan Kinerja untuk menjadi keperdulian seluruh pegawai;
 - 6) Menggunakan Informasi dalam Laporan Kinerja dalam menyesuaikan aktivitas capaian kinerja;
 - 7) Menggunakan Informasi dalam Laporan Kinerja sebagai evaluasi pencapaian keberhasilan;
 - 8) Menggunakan Informasi dalam Laporan Kinerja sebagai tolak ukur perencanaan kinerja berikutnya;
 - 9) Menggunakan informasi dalam Laporan Kinerja sebagai pengaruh dalam perubahan budaya kinerja organisasi;
 - 10) Mengembangkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
 - 11) Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja;

- 12) Meningkatkan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja;
- 13) Melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja;
- 14) Mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja;

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Prabumulih. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di Lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.


INSPEKTUR DAERAH KOTA PRABUMULIH,
H. INDRA BANGSAWAN, S.H, M.M.
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197005091992031001

Tembusan :

Yth. Walikota Prabumulih (sebagai laporan)

Lampiran 5 Tanggapan/ Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023

MATRIK TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2023
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PRABUMULIH

	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	KET
1	Mengumpulkan data kinerja yang relevan sebagai ukuran capaian kinerja	Merengkatkan Kualitas Laporan Kinerja dengan menginfokan seluruh informasi pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, perbandingan dengan level nasional, menyesuaikan dengan perencanaan kinerja selanjutnya, serta menginformasikan kinerja ke seluruh pegawai sehingga akan bisa merubah budaya kinerja Dinas Ketahanan Pangan	12 Bulan	Januari s/d Desember 2024	Sekretaris Dinas	Sedang menyusun Laporan Kinerja dengan menginfokan seluruh informasi pencapaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, perbandingan dengan realisasi level nasional, menyesuaikan dengan perencanaan kinerja selanjutnya, serta menginformasikan kinerja ke seluruh pegawai sehingga akan bisa merubah budaya kinerja Dinas Ketahanan Pangan.	
2	Menyusun Laporan Kinerja yang memuat informasi perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, dan target kinerja tahun-tahun sebelumnya						
3	menyusun Laporan kinerja yang memuat perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)						
4	Menyusun Laporan kinerja yang memuat kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatan						
5	menyajikan informasi dalam laporan kinerja untuk menjadi kepedulian seluruh pegawai						
6	menggunakan informasi dalam laporan kinerja dalam menyesuaikan aktivitas capaian kinerja						
7	menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai evaluasi pencapaian keberhasilan						
8	menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai tolak ukur perencanaan kinerja berikutnya						
9	menggunakan informasi dalam laporan kinerja sebagai pengaruh dalam perubahan budaya kinerja organisasi						
10	Mengembangkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dalam Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Memanfaatkan Aplikasi Smart SAKIP Kota Prabumulih dalam Penyusunan Laporan Kinerja	12 Bulan	Januari - Desember 2024	Sekretaris Dinas	Telah memanfaatkan Aplikasi Smart SAKIP Kota Prabumulih dalam Menyusun Laporan Kinerja	
11	Menindaklanjuti Seluruh Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja	Melakukan Perbaikan-Perbaikan dan peningkatan kinerja dengan menindaklanjuti rekomendasi dan hasil evaluasi kinerja internal	12 Bulan	Januari - Desember 2024	Sekretaris Dinas	Telah melakukan perbaikan-perbaikan dan peningkatan kinerja dengan menindaklanjuti rekomendasi dan hasil evaluasi kinerja internal	
12	Meningkatkan Implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja						

	REKOMENDASI	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/PROGRES PENYELESAIAN	KET
13	Melakukan Perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja						
14	Mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja						

Prabumulih, Januari 2025
 Kepala Dinas Ketahanan Pangan



Prabumulih, S.P., M.Si
 Jabatan Tk. I / IV.b
 NIP. 197403012003122003

Lampiran 6 Prestasi Perangkat Daerah Tahun 2024

